



**TINJAUAN BUKU
KONVERGENSI MULTIKULTURALISME
DAN POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA**

Mentari

Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Tanjungpura, Indonesia
mentari@fisip.untan.ac.id

Hardi Alunaza

Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Tanjungpura, Indonesia
hardi.asd@fisip.untan.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menepis pandangan terkait multikulturalisme dan politik identitas yang sering dipandang sebagai dua hal yang saling berlawanan dan memiliki posisi berbeda. Melalui studi kepustakaan dengan analisis buku, tulisan ini ingin menjawab bahwa makna dan tujuan multikulturalisme dan politik identitas adalah untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang modern, kuat, demokratis, dan makmur sesuai amanah undang-undang. Kesalahpahaman terkait kedua istilah ini dapat menimbulkan di kursus yang menjadi penyebab konflik di tengah masyarakat. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa multikulturalisme hadir sebagai respons dari keberagaman budaya serta sikap toleransi yang harus dijunjung tinggi. Secara rinci tulisan ini terbagi ke dalam dua bagian penting. Pertama, makna dan pendekatan yang digunakan dalam menjelaskan multikulturalisme. Kedua, model respons dan perdebatan terhadap multikulturalisme dan politik identitas yang mampu merawat perbedaan dari sentimen serta dampak negatif bagi keutuhan keberagaman di Indonesia. Politik identitas harus dijaga agar sejalan dengan keberagaman Indonesia yang kaya akan budaya, ras, suku, dan bahasa demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Kata Kunci: Multikulturalisme, Politik Identitas, Persatuan dan Keberagaman.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, multikulturalisme dan politik identitas hadir sebagai isu yang hangat dan sering menjadi perbincangan di ruang publik Indonesia. Meski Indonesia adalah negara dengan budaya yang sangat beragam, tidak dapat disangkal bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengerti akan multikulturalisme. Begitu juga dengan politik identitas, dimana masih banyak masyarakat yang salah persepsi dengan istilah ini. Multikulturalisme dan politik identitas dianggap sebagai dua hal yang saling berlawanan dan memiliki posisi berbeda. Mereka yang memperjuangkan multikulturalisme biasanya akan anti bahkan menentang politik identitas. Sebaliknya, bagi para pejuang politik identitas, pada

umumnya mereka akan sulit menerima kehadiran multikulturalisme, baik sebagai bentuk kebijakan maupun dalam bentuk realita sosial. Sehingga, dalam beberapa tahun menjelang pemilu 2019, para pendukung setia multikulturalisme dan politik identitas seolah saling berhadapan dan menolak satu sama lain. Pendukung multikulturalisme diwakili suara dengan klaim pembela Pancasila dan NKRI. Sementara pendukung politik identitas disematkan pada Islam politik yang heboh dengan gerakan 212.

Umar Suryadi Bakry dalam buku ini menepis pandangan tersebut. Kedua kubu harusnya bisa menjadi padu dan satu dengan memahami makna dan tujuan dari multikulturalisme dan politik identitas. Umar Suryadi berasumsi bahwa kesalahpahaman terhadap multikulturalisme dan politik identitas yang terus dipelihara dapat mempersulit upaya untuk mempersatukan masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang modern, kuat, bersatu, adil, dan makmur sesuai dengan amanah undang-undang dan Pancasila. Buku hadir dengan penjelasan komprehensif untuk menerangkan sisi multikulturalisme dan politik identitas yang sering kali tumpang tindih. Setidaknya buku ini dapat dibelah menjadi dua bagian penting.

Pertama, ulasan mengenai multikulturalisme dengan menggunakan pendekatan, teori, dan konsep terkait. Termasuk berbagai respons dan perdebatan hingga praktek multikulturalisme di Indonesia dan di beberapa negara yang menganut paham demokrasi-liberal. Bagian kedua, elaborasi tentang politik identitas dan perkembangannya yang disertai dengan dukungan perspektif teoritis hingga contoh praktek politik identitas di tiga negara demokrasi terbesar yakni Indonesia, India, dan Amerika Serikat. Secara rinci, buku ini disajikan dan dibagi menjadi 10 bab. Dimulai dengan penjelasan mengenai pendekatan multikulturalisme, konsep terkait multikulturalisme, model multikulturalisme, respons terhadap keanekaragaman budaya, perdebatan dalam multikulturalisme, hak minoritas dan kewarganegaraan, multikulturalisme di negara demokrasi liberal, ruang lingkup politik identitas, perkembangan politik identitas, kajian perspektif mengenai politik identitas, serta praktek multikulturalisme dan politik identitas di negara demokrasi terbesar di dunia. Beberapa konsep penting yang dihadirkan dalam tulisan buku ini guna menjelaskan dan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai multikulturalisme dan politik identitas antara lain, pemahaman mengenai budaya, keanekaragaman budaya, interkulturalisme, pluralisme budaya, kosmopolitanisme, asimilasi, toleransi, dan pengakuan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* dengan jenis penelitian analisis buku. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan buku Multikulturalisme

dan Politik Identitas dalam Teori dan Praktek karya Umar Suryadi Bakry yang kemudian dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis dalam menemukan ide tentang multikultural dan politik identitas secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Makna dan Pendekatan Multikulturalisme

Michael Murphy menyebutkan bahwa ada banyak sekali perbedaan pandangan mengenai multikulturalisme. Sehingga tidak banyak yang dapat menjelaskan dengan jelas apa sebenarnya multikulturalisme dan apa tujuan dari keberadaan multikulturalisme itu sendiri¹. Augie Fleras mendefinisikan multikulturalisme sebagai sebuah kondisi dengan keanekaragaman rasial dan etnis yang disebabkan oleh adanya proses migrasi. Multikulturalisme juga diyakini oleh Umar Suryadi sebagai *recognition of the right* yang menjabarkan multikulturalisme dimulai dengan pengakuan hak untuk berbeda dan juga adanya penghormatan terhadap keanekaragaman budaya².

Multikulturalisme juga dipandang sebagai situasi dimana suatu kelompok dari budaya atau ras yang berbeda dalam suatu masyarakat memiliki hak dan kesempatan serta peluang yang sama, tidak ada yang diabaikan, dan tidak ada pula yang dianggap tidak penting. Konsep mengenai pengakuan terhadap budaya dan etnis maupun ras yang berbeda dalam masyarakat yang multikultural harus dapat berupaya mengakomodasi keyakinan dan praktek budaya yang dapat menambah makna dan nilai bagi kehidupan warga negara. Multikulturalisme juga harus dipandang sebagai doktrin bahwa ada beberapa budaya yang berbeda dalam lingkup nasional namun dapat hidup berdampingan secara damai dan adil. Istilah ini diyakini lahir sebagai bentuk beragamnya kondisi sosial dan kultural serta geografis masyarakat Indonesia³.

Sedikitnya ada tiga bagian usulan dari Umar Suryadi mengenai multikulturalisme. Pertama, multikulturalisme harus dimulai dengan pengamatan yang baik dan menerima kenyataan bahwa masyarakat Indonesia yang paling kontemporer adalah multikultural dalam artian dan fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang memiliki banyak budaya, dimana di masing-masing budaya mengandung banyak paham yang harus diamati dengan baik. Kedua, pemahaman akan multikultural sebagai sesuatu yang telah disetujui bersama (*approved*) daripada melakukan tindakan penentangan atau tidak menunjukkan sikap toleransi. Ketiga, keanekaragaman dalam suatu masyarakat tidak hanya disetujui secara umum, melainkan juga

¹ Saha, A.. "Multiculturalism: A Critical Introduction. *Ethnic and Racial Studies*," 36(1), 2013: 222–224

² Umar Suryadi Bakry. "*Multikulturalisme dan Politik Identitas dalam Teori dan Praktik*," Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

³ Muhadis Azzuhri. "Konsep Multikulturalisme dan Pluralisme dalam Pendidikan Agama," *Forum Tarbiyah*, 10(9), 2012: 13–29.

harus diberikan apresiasi positif dalam bentuk kebijakan publik dan lembaga-lembaga publik dalam kehidupan bermasyarakat.

Memang benar, bahwa wacana mengenai globalisasi jika dihubungkan dengan budaya akan menjadi perdebatan yang sengit. Ada dikotomi dan paradoks yang menyangkut globalisasi dan keanekaragaman budaya. Di satu sisi, globalisasi memiliki potensi untuk memobilisasi masyarakat melakukan pemberdayaan dengan kemajuan teknologi, sebagai sarana representasi diri, dan mendukung identitas kolektif melalui sosialisasi, termasuk memberikan peluang kerja. Dengan kata lain, globalisasi itu dapat menyatukan masyarakat. Namun di sisi lain, globalisasi juga dapat melemahkan kelompok dengan representasi yang keliru yang mengancam integrasi negara majemuk dari segi etnis dan budaya seperti Indonesia⁴.

Bagi Umar Suryadi, globalisasi lebih berpotensi dapat menghidupkan dan memberdayakan berbagai budaya yang pada akhirnya lahir sebagai identitas kelompok dan mendukung terwujudnya budaya nasional yang semakin beragam. Hal tersebut didasarkan pada anggapan bahwa globalisasi memungkinkan representasi diri dari berbagai informasi. Terutama terkait globalisasi media massa yang dapat membantu dan merevitalisasi pemulihan dan pelestarian budaya bangsa. Teknologi media juga dapat digunakan untuk melestarikan bahasa, adat istiadat dan kearifan lokal, termasuk budaya yang belum dikenal oleh masyarakat luas. globalisasi pada kesempatan yang sama dapat memberikan definisi mengenai identitas kolektif dengan mengidentifikasi tempat untuk berbagai macam budaya yang berbeda. Termasuk jaringan politik, ekonomi, sosial yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Globalisasi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk dapat mengikat sistem nilai atau pandangan dan mengakui keberagaman di Indonesia⁵.

Melalui pemahaman konsep tersebut, disebutkan lagi adanya keterlibatan sebagai pemicu berkembangnya ide pluralisme dan kosmopolitanisme termasuk multikulturalisme. Perkembangan tersebut mengintegrasikan budaya dan hubungan manusia yang berpotensi pada proses konvergensi antara multikulturalisme dengan identitas. Hal yang perlu dilakukan adalah menghindari kekeliruan dalam memahami istilah multikulturalisme dan kosmopolitanisme⁶. Kosnick mengemukakan bahwa kosmopolitan dan multikulturalisme memang sering

⁴ Fikri, S. "Politik Identitas dan penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong kito dalam demokrasi lokal)". *TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 18(2), 2018: 167–181

⁵ Masduki, H. "Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Perspektif Kerukunan Antar Umat Beragama," *Dimensi*, 9(1), 2016: 15–23.

⁶ Kariadi, D. "Harmonisasi Nilai Kosmopolitan dan Nasionalisme Melalui Pkn untuk Pendidikan Berwawasan Global," *Jurnal Bina Gogik*, III(2), 2016: 25–39

memperlihatkan hal-hal yang serupa⁷. Misalnya terkait keterbukaan terhadap tradisi suatu budaya dan keinginan serta kemauan untuk terlibat dalam tradisi budaya asing yang berbeda dengan kebudayaan asli yang mereka miliki. Walaupun terlihat sama, namun keduanya adalah berbeda dan dibutuhkan pemahaman yang baik bahwa kosmopolitan adalah salah satu konsep yang mendukung penjelasan multikulturalisme.

2. Model Respons dan Perdebatan Terhadap Multikulturalisme

Stephen Castles menyebutkan bahwa ada prinsip-prinsip kewarganegaraan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan multikultural. Pertama, menjadikan persamaan hak warga negara sebagai titik awal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat menikmati persamaan hak dan kesetaraan di depan hukum. Kedua, mengakui bahwa kesetaraan formal hak tidak selalu mengarah pada kesetaraan rasa hormat, sumber daya, peluang, dan kesejahteraan. Kesetaraan formal memang dapat menutupi diskriminasi. Sementara, masyarakat multikultural harus didasarkan pada penerimaan perbedaan kelompok yang sah dan jauh dari penyimpangan. Ketiga, membangun mekanisme perwakilan dan partisipasi kelompok. Meskipun memiliki kesetaraan sebagai warga negara, minoritas sering kali dikecualikan dalam proses pengambilan keputusan. Kelompok ini membutuhkan pengaturan kelembagaan khusus untuk menjamin partisipasi praktis yang bersifat penuh. Keempat, menjamin perlakuan yang berbeda untuk orang dengan karakteristik, kebutuhan, dan keinginan yang berbeda.

Di Indonesia, politik identitas ini sering kali dimaknai masyarakat sebagai sesuatu yang negatif dengan pemahaman politik identitas adalah politik yang mementang semua orang yang memiliki identitas yang berbeda. Identitas mereka gunakan sebagai bingkai untuk klaim politik, mempromosikan ideologi dan merangsang tindakan sosial politik. Semua itu mereka lakukan dalam konteks ketidakadilan dan ketidaksetaraan dengan tujuan untuk menunjukkan kekhasan dan kepemilikan kelompok serta untuk mendapatkan kekuatan dan pengakuan dari kelompok lain yang biasanya lebih mapan. Oleh sebab itu, politik identitas di Indonesia sering kali dipicu oleh ketegangan dan pergulatan tentang hak untuk memetakan masalah dan mendefinisikan kembali penentuan nasib kelompok. Politik identitas dipandang sebagai konstruksi sosial yang majemuk. Pada saat yang bersamaan, multikulturalisme hadir sebagai representasi atas interaksi di antara elemen masyarakat yang beragam dalam sebuah tataran kehidupan kolektif yang berkelanjutan. Artinya, dimensi atau ajaran multikulturalisme yang merujuk kepada budaya beragam, etnis,

⁷ Hardi. Alunaza., & Sarifudin, M. "Globalisasi Sebagai Katalis Kosmopolitanisme dan Multikulturalisme," *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2), 2017: 177-189

bahasa, dan suku semestinya dikelola dengan baik di ruang publik agar tidak memunculkan perpecahan⁸.

Elemen atau identitas kolektif yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk politik identitas meliputi kelompok usia, agama, kelas sosial, budaya, dialek, kecacatan, pendidikan, etnis, bahasa, kebangsaan, jenis kelamin, identitas gender, pekerjaan, profesi, ras, afiliasi partai politik, pemukiman tempat tinggal, dan status veteran. Berdasarkan elemen tersebut, ruang lingkup politik identitas sangat luas. politik identitas tidak hanya berbasis agama, etnis, budaya, dan kebangsaan seperti yang banyak dipahami orang awam di Indonesia selama ini. Ketika sekelompok orang mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk memilih menteri dari kalangan milenial, hal tersebut juga sudah dapat dikatakan sebagai politik identitas. Pada konteks aktualisasinya, masyarakat dan bangsa yang multikultural selalu memiliki satu ikatan kuat yang dapat merajut segala perbedaan yang ditemukan di dalam masyarakat. Rajutan nilai tersebut tidak didasarkan pada ras, agama, etnis, dan budaya tertentu, melainkan komitmen politis yang menghubungkan segala kepentingan dari etnis yang berbeda. Bila komitmen politis tersebut sudah dibuat, masyarakat yang multikultural akan mampu berdiri kokoh, bertahan lama, dan harmonis di tengah berbagai keberagaman hidup⁹.

Kebijakan Orde Baru yang represif dengan adanya penyeragaman yang kental menimbulkan luapan bom yang sangat keras ketika rezim itu runtuh. Ledakan tersebut ditandai dengan bangkitnya kembali identitas primordial terutama dalam ranah agama dan etnis¹⁰. Ini merupakan sebab utama dan pertama dari gelombang politik identitas di Indonesia. Hal yang tidak kalah penting adalah dengan menguatnya kembali fundamentalis agama pemeluk Islam saat itu. Gelombang Islam transnasional yang membawa paham radikal membuat kelompok Islam fundamentalis semakin mengukuhkan diri dan identitas. Mereka kemudian tidak segan-segan untuk melakukan berbagai manuver untuk menihilkan semua kelompok yang dianggap berbeda.

Pada tahap modern, gerakan politik identitas muncul dengan adanya kebutuhan yang bersifat kondisional, adanya kebutuhan mobilisasi yang berusaha mengajak kelompok untuk menimbulkan perpecahan¹¹. Hal tersebut dapat diawali dengan protes yang mengatasnamakan kepentingan tertentu dan berusaha menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan. Kelebihan

⁸ Purwanto. "Politik Identitas dan Resolusi Konflik Transformatif," *Jurnal Review Politik*, 05(01), 2015: 60–83

⁹ Muthohirin, N. "Politik Identitas Islam dan Urgensi Pendidikan Multikultural," *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 2019: 47–56

¹⁰ Purbatin, W., Soenjoto, P., Al, S., & Mojokerto, H.. Eksploitasi Isu Politik Identitas Terhadap Identitas Politik Pada Generasi Mileneal Indonesia di Era 4.0, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4(2), 2019: 187–217.

¹¹ M. Habibi. Analisis Politik Identitas di Indonesia, 2018.

dari politik identitas adalah tetap menonjolkan budaya yang menjadi ciri khas suatu kelompok. Sementara sisi buruknya adalah sentimen politik identitas yang terlalu kuat dan menonjolkan suatu kelompok dapat menjadi jurang pemisah keberagaman Indonesia. Hal itu disebabkan penafsiran ikatan kesukuan yang terlalu berlebihan.

KESIMPULAN

Tulisan karya Umar Suryadi Bakry ini memang tidak menunjukkan secara langsung koneksi antar multikulturalisme dan politik identitas secara lebih jelas. Namun, dapat dipahami bahwa politik identitas harus menjamin persatuan dan kesatuan masyarakat dan berlandaskan pada nilai-nilai multikulturalisme terutama jika dikaitkan dengan demokrasi yang ada di Indonesia. Fenomena politik identitas yang menentang persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia adalah bentuk menyangkal perjuangan pengakuan atas keberagaman suku, bahasa, etnis, dan agama yang ada di Indonesia. Gerakan politik identitas yang mengatasnamakan kelompok tertentu akan berakibat pada pudarnya persatuan dan terkikisnya perdamaian bangsa ini. Perbedaan yang ada harus dijaga dengan hasrat untuk merawat kesatuan dan keberagaman Indonesia. Perbedaan memang merupakan hal manusiawi yang menjadi pijakan dasar terhadap adanya keanekaragaman budaya, bahasa, etnis, dan agama yang harus dipelihara dan dikokohkan.

Melalui karya ini, Umar Suryadi berusaha menepis anggapan masyarakat bahwa politik identitas selalu berkonotasi negatif. Ia hadir dengan penjelasan bahwa politik identitas harus mampu merawat perbedaan dan jauh dari sentimen serta dampak negatif bagi keutuhan keanekaragaman di Indonesia. Politik identitas harus sejalan dengan pemahaman Indonesia yang multikulturalisme yang terdiri dari banyak suku, ras, etnis, budaya, dan bahasa yang berbeda. Melalui persamaan persepsi akan hal tersebut, setiap aktivitas yang berhubungan dengan politik identitas tidak boleh merugikan kelompok tertentu, terutama kaum-kaum minoritas. Termasuk harus mampu menegakkan sisi persamaan persepsi mengenai hak asasi manusia yang harus dirawat dan dijaga secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Fikri, S. 2018. "Politik Identitas dan dan penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong kito dalam demokrasi lokal)". *TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 18(2): 167–181. <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v18i2.2701>
- Habibi, M. 2018. "Analisis Politik Identitas di Indonesia," <https://doi.org/10.31227/osf.io/pey72>
- Kariadi, D. 2016. "Harmonisasi Nilai Kosmopolitan dan Nasionalisme Melalui Pkn untuk Pendidikan Berwawasan Global," *Jurnal Bina Gogik*, III(2): 25–39. <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/pgsd/article/view/80>

- Masduki, H. 2016. "Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Perspektif Kerukunan Antar Umat Beragama," *Dimensi*, 9(1), 15–23.
- Muhadis Azzuhri. 2012. "Konsep Multikulturalisme dan Pluralisme dalam Pendidikan Agama," *Forum Tarbiyah*, 10(9): 13–29.
- Muthohirin, N. 2019. "Politik Identitas Islam dan Urgensi Pendidikan Multikultural," *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1): 47–56. <https://doi.org/10.18860/jpai.v6i1.8776>
- Purbatin, W., Soenjoto, P., Al, S., & Mojokerto, H. 2019. "Eksploitasi Isu Politik Identitas Terhadap Identitas Politik Pada Generasi Milenial Indonesia di Era 4," *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4(2): 187–217. <https://doi.org/10.21580/jish.42.5223>
- Purwanto. 2015. "Politik Identitas dan Resolusi Konflik Transformatif," *Jurnal Review Politik*, 05(01): 60–83. <http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jrp/article/view/60/60>.
- Saha, A. 2013. "Multiculturalism: A Critical Introduction. *Ethnic and Racial Studies*," 36(1): 222–224. <https://doi.org/10.1080/01419870.2012.720694>
- Hardi. Alunaza., & Sarifudin, M. 2017. "Globalisasi Sebagai Katalis Kosmopolitanisme dan Multikulturalisme," *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2): 177-189. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.7>
- Umar Suryadi Bakry. 2020. "*Multikulturalisme dan Politik Identitas dalam Teori dan Praktik*," Depok: PT Raja Grafindo Persada.